

**ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(STUDI PADA PULAU JAWA DAN BALI)**



SKRIPSI

Oleh

Nama: Lydia Herlina

Nomor Mahasiswa: 08312059

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA 2012**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(STUDI PADA PULAU JAWA DAN BALI)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

oleh

**Nama: Lydia Herlina
Nomor Mahasiswa: 08312059**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Penyusun,



(Lydia Herlina)

**ANALISIS RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
(STUDI PADA PULAU JAWA DAN BALI)**

Hasil Penelitian

diajukan oleh:

Nama : Lydia Herlina

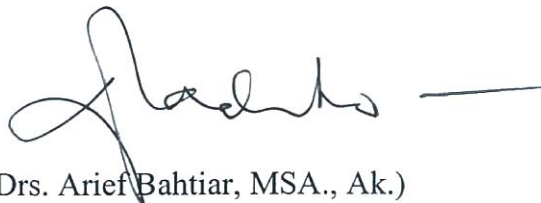
No. Mahasiswa : 08312059

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal *22 Mei 2012*

Dosen Pembimbing,



(Drs. Arief Bahtiar, MSA., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

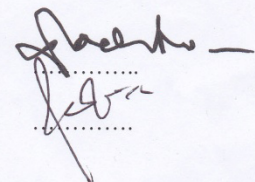
Analisis Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia

Disusun Oleh: LYDIA HERLINA
Nomor Mahasiswa: 08312059

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 7 Juni 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Arief Bachtiar, MSA, Ak, SAS

Penguji : Rifqi Muhammad, SE, M.Sc, SAS



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO

❖ *... Dunia ini teramat gelap gulita, sehingga banyak yang tersesat, dan tak tahu jalan pulang. Mungkin saja... Ilmu dapat jadi penerangnya, untuk menemukan kembali, jalan pulang itu.*

(Ainul Jihad Nurdin)

❖ *Setiap usaha yang disertai kerja keras, kesabaran dan doa akan menghasilkan sesuatu yang indah, dan sesuatu yang indah akan datang pada waktu yang tepat.*

❖ *Don't NATO(No Action Talk Only).*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibu dan Ayahku dan keluargaku yang selalu mencintai, mengasihi dan mendoakanku disetiap langkahku.

Serta sahabat dan teman yang selalu menyayangi dan mendukung di setiap usahaku.....

KATA PENGANTAR
“ *Bismillahirrahmanirrahim*”

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Rasio Keuangan Terhadap Financial Distress pada Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi pada Pulau Jawa dan Bali).**” Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahku Herwan dan Ibuku Rosliana yang telah memberikan dukungan moril dan materil, yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, do’a dan dukungan yang selalu menjadi motivasi untuk selalu berusaha.
2. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA., selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Drs. Arief Bahtiar, MSA., Ak., selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Pak Syamsul Hadi yang telah membantu dan memberikan masukan dalam proses olah data.
7. Mas Wawan yang bekerja di BPK RI yang telah memberikan softcopy data laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009, sehingga sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.

8. Kakakku Megawati dan adikku Muhammad Sidi Firdaus serta keluarga besarku di Dumai yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'a.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan Deviana Dewi Larasati, Fitria Nurul Jannah, dan Afinna Fisabilia yang selalu berjuang bersama dan saling memotivasi.
10. Mas Gandhi dan keluarga yang selalu *sharing*, memberikan nasehat dan membantuku. Terimakasih banyak atas dukungannya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku di Cilacap, imam, ais, nita, citra, ratih, nida dan ais, senang berteman dengan kalian.
12. Teman-teman bimbingan seperjuangan Tika, Wening, Adel, Riza, Sherly, dan Devi. Sukses buat kalian.
13. Mas Arry dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan *support*. Terimakasih.
14. Teman-teman KKN bertempat di Boyolali, Selowangan khususnya unit 18, Mas Bayu, Unyu, Dani, Riskok, Apro, Ichan, serta Yudhis. Aku senang bisa dekat dengan kalian.
15. Teman kos Putri IA: mbak Ocha, mbak Ima, mbak Putri, mbak Vili, mbak pipit, Dewi, Arin, Yuni, mbak Nana, mbak vitoy, mbak Very, mba Reni, Ely, Frida, mbak sisca, mbak Ifa, Nita dan lain-lain. Terimakasih semuanya atas diskusi, *sharing*, kebersamaan, bantuan dan motivasi terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2008 dan rekan-rekan almamater yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, saran dan kritik, kebersamaan dan pengalaman yang berharga selama ini.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Penulis

(Lydia Herlina)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	5
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1. Laporan Keuangan.....	8
2.2. Tujuan Laporan Keuangan.....	9
2.3. Komponen Laporan Keuangan	10
2.3.1. Komponen Laporan Keuangan Instansi.....	10
2.3.1.1. Neraca	11

2.3.1.2. Laporan Laba Rugi.....	11
2.3.1.3. Laporan Perubahan Ekuitas.....	12
2.3.1.4. Laporan Arus Kas	13
2.3.1.5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	14
2.3.2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah	15
2.3.2.1. Laporan Realisasi Anggaran	15
2.3.2.2. Neraca	15
2.3.2.3. Laporan Arus Kas	16
2.3.2.4. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	16
2.4. Pengertian <i>Financial Distress</i>	17
2.5. Informasi Laporan Keuangan dan <i>Financial Distress</i>	17
2.6. Penelitian Terdahulu.....	18
2.7. Formulasi Hipotesis.....	20
2.7.1. Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap <i>Financial Distress</i>	20
2.7.2. Pengaruh Rasio Posisi Keuangan Terhadap <i>Financial Distress</i>	22
2.7.3. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap <i>Financial Distress</i>	24
2.7.4. Pengaruh Rasio Hutang Terhadap <i>Financial Distress</i>	27
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	30
3.2. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	32
3.3.1. Variabel Dependen	32
3.3.2. Variabel Independen	34

3.4. Model Penelitian	36
3.5. Hipotesis Penelitian.....	38
3.6. Teknik Analisis Data	45
3.6.1. Koefisien Determinasi.....	45
3.6.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	46
3.6.3. Uji Multikolinearitas	47
BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1. Deskriptif Statistik.....	50
4.2. Analisis Data	57
4.3. Hasil Perhitungan Regresi Binary Logistic	59
4.3.1. Analisis Model.....	62
4.3.2. Pengujian Hipotesis.....	64
4.3.2.1. Rasio Kinerja Keuangan.....	64
4.3.2.2. Rasio Posisi Keuangan	68
4.3.2.3. Rasio Efisiensi	70
4.3.2.4. Rasio Hutang	75
BAB V. PENUTUP	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Keterbatasan Penelitian	85
5.3. Saran	86
Daftar Pustaka	87
Lampiran	89

DAFTAR TABEL

TABEL 3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	31
TABEL 3.4 Pemerintah Daerah dalam Kondisi <i>Non Financial Distress</i>	33
TABEL 3.5 Rasio Keuangan yang Digunakan.....	34
TABEL 4.1 Deskriptif Statistik.	50
TABEL 4.3 Hasil Regresi Binary Logistik	60
TABEL 4.4 Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis	81

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.6 Model Pengujian.....	48
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sampel Penelitian.....	90
Lampiran 2: Pemerintah Daerah dalam Kondisi <i>Financial Distress</i>	91
Lampiran 3: Uji Multikolinearitas	93

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah terhadap local government distress. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: rasio kinerja keuangan (performance government wealth (PER_{GW}), performance fund (PER_{FUND}), return on equity (ROE), return on asset (ROA) dan profit margin (PM)), rasio posisi keuangan (position government wealth (POS_{GW}) dan (position fund (POS_{FUND})), rasio efisiensi (total expenditure to revenue ratio (ETR), fixed expenditures to operating revenues (FETOR), debt service to asset (DSA), dan level of capital outlay ratio (LCO)), rasio hutang pemerintah (current liquidity government wealth (CL_{GW}), current liquidity fund (CL_{FUND}), liquidity (LQ), current liabilities to net operating (CL_{NOR}), long term debt to total asset (LTDA) dan debt to revenue (DTR)) berpengaruh terhadap local government distress.

Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten dan kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009 yang kemudian perhitungan data tersebut menggunakan Excel 2010.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel level of capital outlay (LCO) dan liquidity (LQ) terbukti mempengaruhi local government distress pada $\alpha=5\%$. Selain itu dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel selain level of capital outlay (LCO) dan liquidity (LQ) tidak terbukti mempengaruhi local government distress pada $\alpha=5\%$.

Key words : local government distress, rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi, rasio hutang pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Paragraf 9) menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif yang terdiri dari relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitatif relevan, suatu informasi dapat dinyatakan sebagai informasi yang relevan jika memenuhi empat kriteria yaitu, memiliki nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediksi (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*). Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji nilai relevan dari suatu laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang dilakukan adalah menggunakan rasio keuangan dalam memprediksi kondisi keuangan *financial distress* suatu entitas. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengukur kesehatan suatu

entitas melalui rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja suatu entitas, sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat diketahui kondisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh suatu entitas untuk periode tertentu. Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai *financial distress* antara lain Almant (1986) yang menggunakan data akuntansi dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang berupa rasio-rasio keuangan sebagai variabel diskriminator dan prediktor kegagalan keuangan perusahaan. Gordon dan Jordan (1988) mengembangkan model *multiple discriminant* untuk memprediksi bank yang sedang mengalami permasalahan keuangan. Platt dan Platt (2002) menggunakan model *logit* untuk membuktikan bahwa *EBITDA/sales*, *current assets/current liabilities* dan *cash flow growth rate* memiliki hubungan yang negatif terhadap kemungkinan mengalami *financial distress*. Zu'maroh (2005) menggunakan model prediksi kepailitan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sebagai representasi kondisi keuangan perusahaan dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yaitu memprediksi kepailitan suatu perusahaan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ingram et al. (1987) yang menghubungkan informasi laporan keuangan dengan risiko kegagalan pemerintah yang diukur dengan *bond rating* dan *yield* atas obligasi pemerintah. Reck et al. (2004) melakukan pengujian yang sama, tetapi dengan menggunakan ukuran risiko kegagalan *interest cost*. Plammer et al. (2007) membuktikan bahwa *total net asset* yang diukur dengan dasar akrual basis mampu meningkatkan kualitas informasi di dalam neraca. Jones dan Walker (2007)

menggunakan tiga variabel independen berupa: *council characteristic*, *infrastructure* dan *financial variables*. Dari penelitian ini diperoleh bukti bahwa variabel *council characteristic* yang diukur dengan jumlah penduduk dan *financial variables* yang diukur dengan pendapatan daerah berpengaruh terhadap *local government distress*. *Local government distress* merupakan ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan dana (kesulitan keuangan) yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007). *Local government distress* atau kesulitan keuangan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah yang menetapkan persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi keuangan tersebut yaitu sebesar nilai *debt service coverage ratio* minimal 2,5. Terdapat berbagai literatur yang berusaha melakukan penelitian mengenai financial distress, tetapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan hanya merujuk pada perusahaan saja.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan replikasi penelitian tentang *local government distress* yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama dua tahun setelah penerbitan laporan keuangan (tahun 2005 memprediksi tahun 2007). Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia selama satu tahun yaitu pada tahun 2009. Dimana sampel penelitian adalah laporan keuangan pemerintah daerah pada pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan asumsi di atas, maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh dari angka-angka rasio dalam laporan keuangan daerah yaitu berupa laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk financial distress dan non financial distress berdasarkan Peraturan Pemerintah No.54/2005 Tentang Pinjaman Daerah. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis Rasio Keuangan terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah di Indonesia.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pada penelitian ini yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “apakah rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap kondisi *local government distress*?”

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang analisis rasio keuangan terhadap financial distress pemerintah daerah di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh rasio keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berpengaruh signifikan terhadap *local government distress*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat sebagai berikut :

- Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan informasi, dan berguna sebagai bahan acuan untuk perbandingan atas penelitian yang sama. Serta bisa juga digunakan sebagai referensi dan bahan kajian bagi penelitian berikutnya untuk mengembangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dan mencoba berbagai variasi sehingga akan diperoleh data yang lebih lengkap tentang informasi laporan keuangan yang relevan kepada semua pihak mengenai *local government distress* yang terjadi di Indonesia.

- Bagi Peneliti

Merupakan kesempatan untuk menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama dibangku kuliah dan menambah wawasan tentang masalah yang terjadi secara nyata di suatu lingkungan tertentu. Khususnya masalah

dalam melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang menjelaskan permasalahan yang diteliti secara ringkas, yang terdiri dari teori mengenai konsep-konsep dasar sebagai landasan dalam penelitian, dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tahap-tahap metode penelitian yang dilakukan, antara lain: populasi dan sampel, pengumpulan data, instrument penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN

Menguraikan hasil analisis dari data yang diperoleh dengan mengumpulkan sampel yang ada dan alat analisis yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Merupakan penutup dari hasil penelitian yang mengemukakan kesimpulan, saran-saran yang bermanfaat, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori yang menjelaskan permasalahan yang diteliti secara ringkas, yang terdiri dari teori mengenai konsep-konsep dasar sebagai landasan dalam penelitian, dan tinjauan penelitian terdahulu. Teori yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah definisi laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, komponen laporan keuangan instansi, komponen laporan keuangan pemerintah, financial distress, serta hubungan laporan keuangan dengan financial distress. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan kombinasi dari data keuangan suatu instansi yang menggambarkan kemajuan instansi dan dibuat secara periodik. Ada beberapa pengertian laporan keuangan diantaranya sebagai berikut, menurut IAI (IAI, 2002 : 2) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap yang biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) catatan (*notes*) dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Menurut Munawir (2000:2), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai

alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu instansi dengan pihak – pihak yang berkepentingan dengan dana atau aktivitas instansi tersebut.

Sedangkan menurut Harnanto (1998:3), laporan keuangan adalah keadaan keuntungan dan hasil usaha instansi serta memberikan rangkuman historis dari sumber ekonomi, kewajiban instansi dan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap sumber ekonomi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan beserta pengungkapannya dibuat instansi dengan tujuan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan–keputusan investasi dan pendanaan, seperti yang dinyatakan dalam SFAC No. 1 bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi :

1. Untuk keputusan investasi dan kredit,
2. Mengenai jumlah dan timing arus kas,
3. Mengenai aktiva dan kewajiban,
4. Mengenai kinerja instansi,
5. Mengenai sumber dan penggunaan kas,
6. Penjelasan dan interpretif, serta
7. Untuk menilai *stewardship*.

Ketujuh tujuan ini terangkum dengan disajikannya laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas dan pengungkapan laporan keuangan.

Menurut PSAK No. 1 :

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas, instansi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai instansi yang meliputi: 1) aktiva, 2) kewajiban, 3) ekuitas, 4) pendapatan, beban termasuk keuntungan dan kerugian, 5) arus kas.

2.3 Komponen Laporan Keuangan

2.3.1 Komponen Laporan Keuangan Instansi

Laporan Keuangan pada umumnya yang lengkap terdiri dari komponen – komponen berikut ini:

- a) Neraca
- b) Laporan laba rugi
- c) Laporan perubahan ekuitas
- d) Laporan arus kas
- e) Catatan atas laporan keuangan.

2.3.1.1 Neraca

Neraca disajikan sedemikian rupa yang menggambarkan posisi keuangan suatu instansi pada saat tertentu maksudnya adalah menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu biasanya pada saat tutup buku.

Neraca minimal mencakup pos – pos berikut (IAI, 2004) :

- a) Aktiva berwujud,
- b) Aktiva tidak berwujud,
- c) Aktiva keuangan,
- d) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
- e) Persediaan,
- f) Piutang usaha dan piutang lainnya,
- g) Kas dan setara kas,
- h) Hutang usaha dan hutang lainnya,
- i) Kewajiban yang diestimasi,
- j) Kewajiban berbunga jangka panjang,
- k) Hak minoritas,
- l) Modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2.3.1.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu instansi selama

periode tertentu (Munawir, 2000:26). Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan riil instansi dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi instansi disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos – pos berikut (IAI, 2004:) :

- a) Pendapatan,
- b) Laba rugi usaha,
- c) Beban pinjaman,
- d) Bagian dari laba atau rugi instansi afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas,
- e) Beban pajak,
- f) Laba atau rugi dari aktivitas normal instansi,
- g) Pos luar biasa,
- h) Hak minoritas,
- i) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

2.3.1.3 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Instansi harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan (IAI, 2004) :

- a) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan,
- b) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas,
- c) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait,
- d) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik,
- e) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, dan
- f) Rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan instansi selama periode yang bersangkutan.

2.3.1.4 Laporan arus kas

Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih instansi, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi

dengan perubahan keadaan dan peluang (IAI, 2004). Informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan instansi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan (*future cash flow*) dari berbagai instansi.

2.3.1.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan (IAI, 2004) :

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting,
- b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.3.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Laporan Arus Kas
- d) Catatan Atas Laporan Keuangan

2.3.2.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada tahun tersebut serta realisasi pada tahun sebelumnya. Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2.3.2.2 Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah pada tahun tertentu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

2.3.2.3 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan arus kas terdiri atas aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.

2.3.2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari BUD.

2.4 Pengertian *Financial Distress*

Financial distress biasanya terjadi sebelum kebangkrutan. Kondisi financial distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Mc Cue (1991) mendefinisikan *financial distress* sebagai arus kas negatif. Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* sebagai perubahan harga ekuitas. Lau (1987) dan Hill *et al* (1996) menyatakan bahwa perusahaan mengalami kondisi *financial distress* jika perusahaan tersebut melakukan pemberhentian karyawan atau menghilangkan pembayaran deviden. Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Ketidakmampuan pemerintah ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan pada publik tersebut.

2.5 Informasi Laporan Keuangan dan *Financial Distress*

Laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu media yang menyediakan informasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk membuktikan laporan keuangan yang diterbitkan bermanfaat atau tidak maka, dilakukan berbagai macam penelitian mengenai manfaat laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitian yang dilakukan adalah menggunakan rasio keuangan dalam mengevaluasi kondisi keuangan *financial*

distress. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengukur kesehatan melalui rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk informasi akuntansi yang penting dalam proses penilaian kinerja pemerintah daerah, sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat diketahui kondisi keuangan dan kinerja yang telah dicapai oleh pemerintah daerah untuk suatu periode tertentu.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan antara lain Plammer et al. (2007) yang menghubungkan risiko kegagalan dengan variabel akuntansi yang membentuk laporan keuangan pemerintah. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah risiko kegagalan distrik sekolah (*school district's default risk*) dan beberapa variabel akuntansi yang menjadi komponen laporan keuangan, meliputi; *total net asset* untuk mengukur posisi keuangan, *revenues minus expense* untuk mengukur kinerja keuangan dan *current liabilities*. Plammer et al. (2007) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *total net asset* dalam laporan keuangan dengan dasar akrual basis menyediakan peningkatan informasi dalam neraca, sementara itu, untuk *revenues minus expense* dan *current liabilities* tidak menyediakan peningkatan informasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ukuran *total net asset* dengan dasar akrual basis dalam neraca dan modifikasi akrual basis untuk *revenues minus expense* dapat menyediakan informasi untuk menjelaskan risiko kegagalan distrik sekolah.

Jones dan Walker (2007) melakukan pengujian *local government distress* di Australia dengan menggunakan tiga variabel berupa: *council characteristic*, *local service delivery*, *infrastructure* dan *financial variables*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi *local government distress* yaitu jumlah penduduk dan jumlah pendapatan daerah yang merupakan ukuran-ukuran dalam *financial variables*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian tentang *local government distress* di Indonesia telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo, dan Doddy Setiawan (2010) yang meneliti tentang nilai relevan informasi laporan keuangan terkait *financial distress* pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, menguji pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap *financial distress*. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi, dan rasio hutang terhadap *financial distress*. Sampel yang digunakan adalah 232 laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 148 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2006 dan 84 laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2007. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengujian prediksi menggunakan model penelitian dengan *binary logistic regression* menunjukkan bahwa variabel ROA, POS_{GW}, CLGW, CL_{NOR}, LQ dan LTDA berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada periode satu tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan. Untuk pengujian prediksi *financial distress* dua tahun setelah tahun penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah membuktikan bahwa variabel PER_{GW}, LCO, LTDA dan DTR berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

2.7 Formulasi Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Steven dan McGowen (1983) menggunakan variabel indikator kinerja keuangan berupa rasio *external reliance measure*. Salah satu indikator keuangan yang digunakan adalah rasio terkait *revenue, expenditure* yang menggambarkan kinerja keuangan pemerintah. Ryan et al. (2000) menggunakan indikator kinerja keuangan *revenue flexibility/intensity*. Cohen (2006) menggunakan indikator kinerja keuangan berupa ROE, ROA dan *profit margin* dalam penelitian yang dilakukannya yang membuktikan bahwa kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk. Plammer et al. (2007) melakukan penelitian terkait risiko kegagalan keuangan pemerintah dengan menggunakan rasio kinerja keuangan pemerintah berupa kinerja keuangan dari anggaran pemerintah (PER_{GW}) dan kinerja keuangan pemerintah dari ekuitas dana (PER_{FUND}) dengan bukti yang diperoleh bahwa PER_{GW} dan PER_{FUND} berpengaruh terhadap *bond rating* sebagai proksi kegagalan keuangan pemerintah. Jones dan Walker (2007) menggunakan *financial variable* dalam penelitian *local government distress* di Australia. Salah satu rasio dalam *financial variable* tersebut adalah rasio kinerja pemerintah berupa ROA dan *net income (surplus) by annual interest payment (Nicovert)* yang berpengaruh terhadap *government local distress*.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio *performance government wealth*, *performance fund* (Plammer et al. 2007), ROE, ROA dan *profit margin* (Cohen, 2006) yang menggunakan jumlah surplus atau defisit atas realisasi atas APBD yang menggunakan natural log untuk mengontrol ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah tersebut mempunyai angka rasio kinerja keuangan yang tinggi. Namun demikian selisih (surplus) yang tinggi tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode berikutnya. Surplus yang dihasilkan pemerintah daerah tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan pemerintah daerah bersangkutan hanya diperbolehkan mengajukan anggaran pada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya. Oleh karena alasan tersebut, maka pemerintah daerah yang mempunyai surplus yang tinggi hingga mempunyai probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress* sehingga tidak mampu menyediakan pelayanan pada publik sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, hipotesis rasio kinerja dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

Ha₁: Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance government wealth* (PER_{GW}) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₂: Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance fund* (PER_{FUND}) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₃: Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₄: Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₅: Rasio kinerja keuangan yang berupa *profit margin* (PM) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

2.7.2 Pengaruh Rasio Posisi Keuangan Terhadap *Financial Distress*

Plammer et al. (2007) menggunakan dua indikator posisi keuangan pemerintah berupa *position government wealth* (POS_{GW}) dan *position fund* (POS_{FUND}) yang menggunakan natural log untuk mengontrol ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Hasil penelitian membuktikan bahwa kedua indikator posisi keuangan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kegagalan keuangan pemerintah. Kedua indikator keuangan tersebut menggambarkan jumlah perbandingan komponen laporan keuangan untuk menilai posisi keuangan

pemerintah melalui laporan keuangan pemerintah. POS_{FUND} merupakan perbandingan antara total *fund balance* dengan total *fund revenue*. Rasio ini menggambarkan total dana pemerintah atas jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah dana yang tinggi hingga mampu membiayai proses kegiatan pemerintah dalam menyediakan pelayanan, sehingga semakin kecil kemungkinan daerah mengalami *financial distress*. POS_{GW} merupakan gambaran dari perbandingan antara jumlah *net asset* dengan jumlah *total revenue*. Angka rasio POS_{GW} yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik dan infrastruktur tersebut didanai dari pendapatan daerah, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, semakin kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Oleh karena itu, hipotesis rasio posisi keuangan dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

Ha₆: Rasio posisi keuangan yang berupa *position fund ratio* (POS_{FUND}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₇: Rasio posisi keuangan yang berupa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

2.7.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap *Financial Distress*

Menurut Halim dan Damayanti (2008) efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu, atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Jadi, efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara *output* dengan *input* (biaya). Cohen (2006) melakukan penelitian terkait dengan rasio efisiensi yang terjadi dalam pemerintah berupa: *total expenditure to total revenues* (ETR) dan *fixed cost to operating revenue* (FETOR). ETR merupakan perbandingan antara jumlah total pengeluaran dengan jumlah total pendapatan Pemerintah. Angka rasio ETR yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai pengeluaran yang tinggi dan mengindikasikan bahwa pemerintah daerah dalam kondisi yang tidak efisien serta mempunyai probabilitas yang tinggi untuk mengalami *financial distress*. FETOR merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran tetap (rutin) dengan jumlah pendapatan asli daerah. Angka rasio FETOR yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menanggung pengeluaran tetap yang tinggi dengan pendapatan asli daerah yang rendah. Kondisi ini dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah berada dalam kondisi yang tidak efisien dan mempunyai probabilitas tinggi untuk mengalami *financial distress*.

Groves et al. (2001) juga menggunakan rasio efisiensi pemerintah pada penelitian yang dialkukanya. Rasio yang digunakan Groves et al. (2001) tersebut adalah *debt service to asset* (DSA), *maintenance effort* (ME) dan *level of capital outlay* (LCO). *Debt service to asset* (DSA) merupakan perbandingan antara

jumlah total pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap jumlah *total asset*. Rasio ini menggambarkan jumlah *asset* yang digunakan untuk menutup jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman. Semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah *asset* pemerintah daerah yang digunakan dalam pembayaran pokok pinjaman dan bunga, sehingga dapat dinyatakan pemerintah dalam kondisi tidak efisien mempunyai probabilitas tinggi untuk mengalami *financial distress*. *Maintenance effort* (ME) merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap jumlah *total asset* pemerintah daerah. Angka rasio *maintenance effort* (ME) yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menanggung pengeluaran yang tinggi dalam tiap periodenya, sehingga pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan dalam kondisi yang tidak atau kurang efisien. Tingginya jumlah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan *asset* tersebut dapat mengganggu pembiayaan pembangunan daerah, sehingga menjadikan probabilitas pemerintah daerah tersebut untuk mengalami *financial distress* tinggi. *Level of capital outlay ratio* (LCO) merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran modal terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi angka rasio mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai jumlah pengeluaran modal yang tinggi atas jumlah pendapatan daerah. Tingginya angka rasio ini memberi penggambaran bahwa tinggi pula probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Rasio efisiensi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *total expenditure to revenue ratio*

(ETR), *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR), *debt service to asset* (DSA), serta *level of capital outlay ratio* (LCO) yang menggunakan natural log untuk mengontrol ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Oleh karena itu, hipotesis rasio efisiensi dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

Ha₈: Rasio efisiensi yang berupa *total expenditure to revenue ratio* (ETR) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₉: Rasio efisiensi yang berupa *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₁₀: Rasio efisiensi yang berupa *debt service to asset* (DSA) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Ha₁₁: Rasio efisiensi yang berupa *level of capital outlay ratio* (LCO) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

2.7.4 Pengaruh Rasio Hutang Terhadap *Financial Distress*

Beberapa penelitian pada sektor publik yang menggunakan rasio kewajiban telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ryan et al. (2000) menggunakan indikator kewajiban pemerintah berupa *indebtedness* dengan hasil bahwa *indebtedness* berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah. Sementara itu, Cohen (2006) menggunakan rasio terkait kewajiban keuangan pemerintah berupa *current ratio*, *debt to equity ratio*, *long term liabilities to total assets* terkait kinerja pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian ini adalah bahwa rasio hutang pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah pendapatan serta jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Plammer et al. (2007) menggunakan rasio kewajiban dalam terkait risiko kegagalan pemerintah. Rasio hutang yang digunakan meliputi *UNA*, *RNA_DEBT*, *RNA_OTHER*, *CLGW* dan *CLFUND*. Bukti empiris dari penelitian ini adalah bahwa *CLGW* dan *RNA_DEBT* tidak berpengaruh pada risiko kegagalan keuangan pemerintah. Sementara itu, untuk rasio hutang pemerintah lain: *UNA*, *RNA_OTHER* dan *CLFUND* berpengaruh terhadap risiko kegagalan pemerintah. Jones dan Walker (2007) menggunakan rasio hutang pemerintah *DEBTA*, *TLTA*, *CACL* dan *CIBL* dalam prediksi *local government distress*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio hutang pemerintah yang digunakan dalam penelitian tersebut mempunyai pengaruh terhadap *local government distress*. Penelitian ini menggunakan rasio hutang *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}) sebagaimana digunakan Plammer et al. (2007), *liquidity*

(LQ), *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}), *long term debt to total asset* (LTDA) dan *debt to revenue* (DTR) seperti yang digunakan Cohen (2006) dengan menggunakan natural log untuk mengontrol ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Penggunaan rasio hutang ini didasarkan pada ketersediaan data dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini. Hutang pemerintah merupakan bagian penting dalam pendanaan. Hutang pemerintah dapat digunakan sebagai penopang dalam pembiayaan pembangunan di daerah jika pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan dana pemerintah daerah (Halim dan Damayanti, 2008). Menurut PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman baik pada pemerintah pusat maupun pihak ketiga. Hutang yang terjadi pada sektor publik/pemerintah berbeda dengan hutang pada sektor swasta. Hal ini berimplikasi pada jumlah hutang dan bunga pinjaman pemerintah daerah. Jumlah hutang yang tinggi bukan jaminan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan pinjaman. Semakin tinggi jumlah hutang pemerintah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*, sehingga pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* berkecenderungan untuk mempunyai jumlah hutang yang lebih kecil bila dibanding pemerintah daerah *non financial distress*. Oleh karena itu, hipotesis rasio hutang dalam penelitian yang dapat dinyatakan seperti berikut ini.

- Ha₁₂: Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability government wealth* (CL_{GW}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.
- Ha₁₃: Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability fund* (CL_{FUND}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.
- Ha₁₄: Rasio hutang pemerintah yang berupa *liquidity* (LQ) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.
- Ha₁₅: Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liabilities to net operating* (CL_{NOR}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.
- Ha₁₆: Rasio hutang pemerintah yang berupa *long term debt to total asset* (LTDA) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.
- Ha₁₇: Rasio hutang pemerintah yang berupa *debt to revenue* (DTR) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tahap-tahap metode penelitian yang dilakukan, antara lain: populasi dan sampel, pengumpulan data, instrument penelitian, dan metode analisis data.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2009 pada Badan Pemeriksa Keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009. Alasan peneliti menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah hanya pada pulau Jawa dan Bali karena kriteria laporan keuangan dua pulau tersebut hampir sama dan tidak jauh berbeda dibandingkan laporan-laporan keuangan pemerintah daerah yang lain (diluar pulau Jawa dan Bali). Selain itu untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang terlalu tinggi antar laporan keuangan pemerintah daerah yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengambilan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data jenis ini biasanya dikumpulkan oleh suatu lembaga tertentu, seperti BPS (Biro Pusat Statistik) atau lembaga-lembaga swasta lain dan diterbitkan secara berkala untuk kepentingan umum (Syamsul Hadi,2009). Data dalam penelitian diperoleh dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (Sekaran, 2003). Pemilihan sampel penelitian terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009.	102
Dikurangi: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009 yang mempunyai <i>adverse opinion</i> dan <i>disclamer opinion</i> .	(5)
Dikurangi: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009 yang tidak menyajikan hutang jangka panjang.	(44)
Dikurangi: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009 yang menyajikan data dan informasi secara tidak lengkap.	(8)
Jumlah observasi dalam penelitian.	45

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota) yang menjadi sampel penelitian ini, tersaji pada bagian lampiran 1.

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas pemerintah daerah untuk *financial distress* dan *non financial distress* berdasar Peraturan Pemerintah No. 54/2005 Tentang Pinjaman Daerah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat melakukan pinjaman daerah adalah nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Untuk pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR < 2,5$ tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, maka dinyatakan mengalami *financial distress* dan dilambangkan dengan angka 0, sementara untuk pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR \geq 2,5$ dinyatakan dalam kondisi *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1.

$$DSCR = \frac{((PAD + BD + DAU) - BW)}{P + B + BL} \geq X$$

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Dana bagi hasil - Dana bagi hasil reboisasi

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja wajib

P = Pokok Pinjaman

B = Bunga

BL = Biaya lain

Pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR < 2,5$ tidak diperbolehkan melakukan pinjaman, maka dinyatakan mengalami *financial distress* dan dilambangkan dengan angka 0, tersaji dalam bagian lampiran 2. Pemerintah daerah yang mempunyai $DSCR \geq 2,5$ dinyatakan dalam kondisi *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4

1	Kabupaten Semarang
2	Sukoharjo
3	Kota Semarang
4	Kota Yogyakarta
5	Lumajang
6	Cirebon
7	Blora
8	Rembang
9	Surakarta
10	Sleman

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam pelaporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio sebagaimana digunakan dalam penelitian Steven dan Mc Gowen (1983), Groves et al. (2001) dan Cohen (2006) serta Plammer et al. (2007). Rasio yang dipilih dalam penelitian ini disesuaikan dengan data dan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dinatural log untuk mengontrol ketidaklinieran data yang sangat tinggi. Rasio-rasio keuangan yang digunakan adalah :

Tabel 3.5

VARIABEL	KODE	FORMULA
<i>Performance Government Wealth</i>	PERF _{GW}	$\frac{\text{Total Revenues} - \text{Total Expenditures}}{\text{Total Revenues}}$
Performance Fund	PER _{FUND}	$\frac{\text{Total Revenues} - \text{Total Expenditures}}{\text{Total Fund Revenues}}$
Return on equity	ROE	$\frac{\text{Net Surplus (Deficit)}}{\text{Total Equity}}$
Return on asset	ROA	$\frac{\text{Net Surplus (Deficit)}}{\text{Total Assets}}$
Profit margin	PM	$\frac{\text{Net Surplus (Deficit)}}{\text{Net Operating Revenues}}$
Position Government	POS _{GW}	$\frac{\text{Total Net Assets}}{\text{Total Revenues}}$
Position Fund	POS _{FUND}	$\frac{\text{Total Fund Balance}}{\text{Total Fund Revenues}}$

Debt Service to Assets	DSA	$\frac{\text{Net Direct Debt Service}}{\text{Total Asset}}$
Level of Capital Outlay	LCO	$\frac{\text{Capital Outlay From Operating Fund}}{\text{Total Revenues}}$
Total Expenditure to Total Revenue	ETR	$\frac{\text{Total Expenditures}}{\text{Total Revenues}}$
Fixed Expenditure to Operating Revenues	FETOR	$\frac{\text{Fixed Cost}}{\text{Net Operating Revenues}}$
Current Liability Government Wealth	CL _{GW}	$\frac{\text{Current Liabilities and Liabilities of Long Term Liabilities}}{\text{Total Revenues}}$
Current Liability Fund	CL _{Fund}	$\frac{\text{Fund Liabilities}}{\text{Total Fund Revenues}}$
Liquidity	LQ	$\frac{\text{Cash \& Short Investment}}{\text{Current Liabilities}}$
Current Liabilities to Net Operating Revenues	CL _{NOR}	$\frac{\text{Current Liabilities}}{\text{Net Operating Revenues}}$
Long Term Debt To Total Asset	LTDA	$\frac{\text{Net Long Debt}}{\text{Total Asset}}$
Debt To Revenue	DTR	$\frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Revenues}}$

3.4 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan model *binary logistic regression* dengan menggunakan bantuan software *Excel 2010*. Model *binary logistic regression* merupakan regresi dengan dua kategori (*binary*) (Ghozali, 2006). Pengujian dengan *binary logistic regression* mengesampingkan asumsi normalitas data penelitian, karena variabel penelitian merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (*non metrik*) sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2006). Model persamaan *binary logistic regression* yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{Ln} \frac{F}{F-1} = & \beta_0 + \beta_1 \text{PERGW} + \beta_2 \text{PERFUND} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{ROA} + \beta_5 \text{PM} + \beta_6 \\ & \text{POSGW} + \beta_7 \text{POSFUND} + \beta_8 \text{DSA} + \beta_9 \text{ME} + \beta_{10} \text{LCO} + \beta_{11} \\ & \text{ETR} + \beta_{12} \text{FETOR} + \beta_{13} \text{CLGW} + \beta_{14} \text{CLFUND} + \beta_{15} \text{LQ} + \beta_{16} \\ & \text{CLNOR} + \beta_{17} \text{LTDA} + \beta_{18} \text{DTR} \end{aligned}$$

Dimana :

$\text{Ln} \frac{F}{F-1}$ = Probabilitas pemerintah daerah untuk financial distress dan non financial distress

PERGW = *Perfomance Government Wealth*

PERFUND = *Perfomance Fund*

ROE = *Return on Equity*

ROA = *Return on Asset*

PM = *Profit Margin*

POSGW = *Position Government*

POSFUND = *Position Fund*

DSA = *Debt Service to Asset*

ME = *Maintenance effort*

LCO = *Level of Capital Outlay*

ETR = *Total Expenditure to Total Revenue*

FETOR = *Fixed Expenditure to Operating Revenues*

CLGW = *Current Liability Government Wealth*

CLFUND = *Current Liability Fund*

LQ = *Liquidity*

CLNOR = *Current Liabilities to Net Operating Revenue*

LTDA = *Long Term Debt to Total Asset*

DTR = *Debt to Revenue*

3.5 Hipotesis Penelitian

Untuk hipotesis 1 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 \leq 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance government wealth* (PER_{GW}) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_1 > 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance government wealth* (PER_{GW}) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 2 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_2 \leq 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance fund* (PER_{FUND}) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_2 > 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance fund* (PER_{FUND}) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 3 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_3 \leq 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on equity* (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_3 > 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 4 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_4 \leq 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on asset* (ROA) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_4 > 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 5 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_5 \leq 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *profit margin* (PM) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_5 > 0$ Rasio kinerja keuangan yang berupa *profit margin* (PM) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 6 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_6 \leq 0$ Rasio posisi keuangan yang berupa *position fund ratio* (POS_{FUND}) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_6 > 0$ Rasio posisi keuangan yang berupa *position fund ratio* (POS_{FUND}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 7 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_7 \leq 0$ Rasio posisi keuangan yang berupa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_7 > 0$ Rasio posisi keuangan yang berupa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 8 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_8 \leq 0$ Rasio efisiensi yang berupa *total expenditure to revenue ratio* (ETR) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H_a 8: $\beta_8 > 0$ Rasio efisiensi yang berupa *total expenditure to revenue ratio* (ETR) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 9 dapat dinotasikan sebagai berikut :

H₀ 9: $\beta_9 \leq 0$ Rasio efisiensi yang berupa *fixed cost to operating revenue* (FETOR) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H_a 9: $\beta_9 > 0$ Rasio efisiensi yang berupa *fixed cost to operating revenue* (FETOR) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 10 dapat dinotasikan sebagai berikut :

H₀ 10: $\beta_{10} \leq 0$ Rasio efisiensi yang berupa *debt service to asset* (DSA) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H_a 10: $\beta_{10} > 0$ Rasio efisiensi yang berupa *debt service to asset* (DSA) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 11 dapat dinotasikan sebagai berikut :

H_0 11: $\beta_{11} \leq 0$ Rasio efisiensi yang berupa *level of capital outlay ratio* (LCO) tidak berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H_a 11: $\beta_{11} > 0$ Rasio efisiensi yang berupa *level of capital outlay ratio* (LCO) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 12 dapat dinotasikan sebagai berikut :

H_0 12: $\beta_{12} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability government wealth* (CL_{GW}) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

H_a 12: $\beta_{12} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability government wealth* (CL_{GW}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 13 dapat dinotasikan sebagai berikut :

H_0 13: $\beta_{13} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability fund* (CL_{FUND}) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a^{13}: \beta_{13} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability fund* (CL_{FUND}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 14 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0^{14}: \beta_{14} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *liquidity* (LQ) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a^{14}: \beta_{14} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *liquidity* (LQ) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 15 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0^{15}: \beta_{15} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a^{15}: \beta_{15} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 16 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_{16} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *long term debt to total asset* (LTDA) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_{16} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *long term debt to total asset* (LTDA) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Untuk hipotesis 17 dapat dinotasikan sebagai berikut :

$H_0: \beta_{17} \leq 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *debt to revenue* (DTR) tidak berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

$H_a: \beta_{17} > 0$ Rasio hutang pemerintah yang berupa *debt to revenue* (DTR) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Tetapi koefisien determinasi memiliki kelemahan yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Banyak peneliti yang menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataannya nilai Adjusted R^2 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka nilai $\text{adjusted } R^2 = 0$, maka $\text{adjusted } R^2 = (1-k) / (n-k)$. Jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif (Ghozali, 2001).

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/ terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

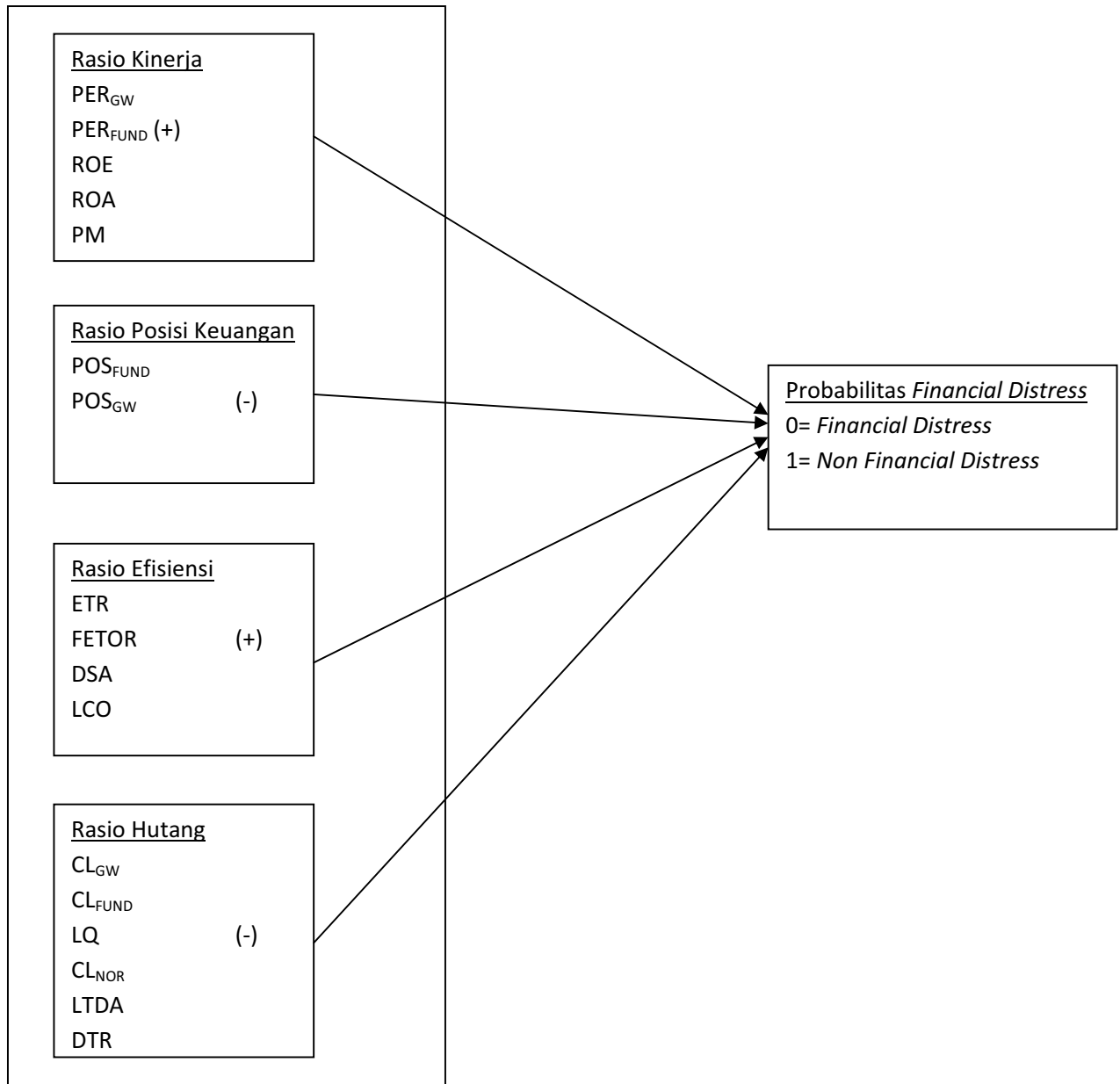
Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- H_0 dapat ditolak jika nilai $\alpha \geq 5\%$. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A (Ghozali, 2001).

3.6.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Sebuah persamaan regresi dikatakan baik bila persamaan tersebut memiliki variabel independen yang saling tidak berkorelasi (Syamsul Hadi,2009). Semakin rendah korelasi antar variabel independen maka persamaan tersebut semakin baik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat besarnya nilai signifikan yang terjadi antar variabel bebas.

Gambar 3.6 Model Pengujian



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang statistik deskriptif dari masing-masing variabel secara umum atas data yang telah diolah, antara lain nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Dalam bab ini juga menjelaskan mengenai analisis data dengan menggunakan uji multikolinearitas, untuk menguji apakah ada hubungan di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Setelah dilakukan uji multikolinearitas maka akan diperoleh variabel-variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi *binary logistic*. Setelah itu dilakukan analisis model dan pengujian hipotesa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2009 di Indonesia berupa *softcopy* yang diperoleh dari dokumentasi arsip-arsip Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang ada, antara lain laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II tidak mempunyai *adverse opinion* dan *disclaimer opinion* dan laporan keuangan pemerintah daerah tingkat II menyajikan hutang jangka panjang serta laporan

keuangan pemerintah daerah tingkat II menyajikan data dan informasi secara lengkap. Dari 102 sampel, terdapat 45 sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penelitian ini mengenai probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* dan *non financial distress* yang digunakan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PER_{GW} , PER_{FUND} , ROE, ROA, PM, POS_{GW} , POS_{FUND} , DSA, LCO, ETR, FETOR, CL_{GW} , CL_{FUND} , LQ, CL, LTDA, serta DTR yang merupakan proksi dari rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi, serta rasio hutang.

4.1 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik ini menunjukkan tentang data masing-masing variabel secara umum atas data yang telah diolah, antara lain nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi. Untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Variabel	Mean	Standar Deviasi	Minimum	Maximum	Count
PER _{gw}	0.003578	0.039011938	-0.114	0.084	45
PER _{fund}	2.625533	16.87659708	-35.962	89.588	45
ROE	-0.01013	0.093445317	-0.617	0.03	45
ROA	0.049044	0.30494403	-0.062	2.044	45
PM	-0.02558	0.405565121	-1.658	0.633	45

POSgw	0.1136	0.05011777	0.026	0.263	45
POSfund	13.78749	8.667575772	7.623	59.676	45
LCO	0.190911	0.087145861	0.076	0.411	45
ETR	0.996422	0.039011938	0.916	1.114	45
FETOR	9.808	4.472890783	0.975	27.396	45
DSA	0.0168	0.011142874	0.005	0.04	45
CLgw	0.017356	0.011828616	0.005	0.047	45
CLF	3.239556	15.86884533	0.002	106.593	45
LQ	123.6158	166.1837284	1.098	628.76	45
DTR	0.015178	0.023584749	0.001	0.116	45
LTDA	0.176267	0.792650571	0.002	5	45
CLNOR	0.096511	0.124713421	0.006	0.51	45

Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 sampel. Statistik deskriptif di atas menunjukkan nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi dari seluruh variabel independen. Untuk rasio kinerja diproksikan dengan *performance government wealth* (PER_{GW}), *performance fund* (PER_{FUND}), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA) dan *profit margin* (PM). Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *performance government wealth* (PER_{GW}) memiliki nilai minimum sebesar -0.114 dan nilai maksimum 0.084 dengan nilai rata-rata 0.003578 dan standar deviasi sebesar 0.039011938. Dilihat dari nilai rata-rata

PER_{GW} dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki kinerja keuangan dari anggaran pemerintah yang baik, karena yang mendekati nilai minimum hanya beberapa pemerintah daerah saja dan kebanyakan nilai *performance government wealth* (PER_{GW}) ada pada level rata-rata. Untuk variabel *performance fund* (PER_{FUND}) memiliki nilai minimum sebesar -35.962 dan nilai maksimum 89.588 dengan nilai rata-rata 2.625533 dan standar deviasi sebesar 16.87659708. Dilihat dari nilai rata-rata PER_{FUND} dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki kinerja keuangan dari ekuitas dana yang baik, karena yang mendekati nilai minimum hanya beberapa pemerintah daerah saja dan *performance fund* (PER_{FUND}) ada pada level rata-rata.

Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *return on equity* (ROE) memiliki nilai minimum sebesar -0.617 dan nilai maksimum 0.03 dengan nilai rata-rata -0.01013 dan standar deviasi sebesar 0.093445317 . Dilihat dari nilai rata-rata PER_{GW} dan standar deviasinya terlihat bahwa beberapa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mengalami defisit. Untuk variabel *return on asset* (ROA) memiliki nilai minimum sebesar -0.062 dan nilai maksimum 2.044 dengan nilai rata-rata 0.049044 dan standar deviasi sebesar 0.30494403. Dilihat dari nilai rata-rata ROA dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki surplus atas pengelolaan assets yang dimiliki oleh pemerintah daerah, karena yang mendekati nilai minimum hanya beberapa pemerintah daerah saja dan

ROA ada pada level rata-rata. Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *profit margin* (PM) memiliki nilai minimum sebesar -1.658 dan nilai maksimum 0.633 dengan nilai rata-rata -0.02558 dan standar deviasi sebesar 0.405565121. Dilihat dari nilai rata-rata PM dan standar deviasinya terlihat bahwa beberapa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mengalami defisit.

Untuk rasio posisi keuangan diproksikan dengan *position fund ratio* (POS_{FUND}) dan *position government wealth ratio* (POS_{GW}). Dalam tabel 4.1 dapat diketahui bahwa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) memiliki nilai minimum sebesar 0.026 dan nilai maksimum 0.263 dengan nilai rata-rata 0.1136 dan standar deviasi sebesar 0.05011777. Dilihat dari nilai rata-rata POS_{GW} dan standar deviasinya terlihat bahwa beberapa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mempunyai infrastruktur yang cukup untuk memberi pelayanan pada publik dan infrastruktur tersebut didanai dari pendapatan asli daerah, sehingga semakin tinggi angka rasio ini, semakin kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*.

Untuk variabel *position fund ratio* (POS_{FUND}) memiliki nilai minimum sebesar 7.623 dan nilai maksimum 59.676 dengan nilai rata-rata 13.78749 dan standar deviasi sebesar 8.667575772. Dilihat dari nilai rata-rata POS_{FUND} dan standar deviasinya terlihat bahwa beberapa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mempunyai jumlah dana yang cukup tinggi hingga mampu membiayai proses kegiatan pemerintah dalam menyediakan pelayanan, sehingga semakin kecil kemungkinan daerah mengalami *financial distress*.

Untuk rasio efisiensi diproksikan dengan *total expenditure to revenue ratio* (ETR), *fixed cost to operating revenue* (FETOR), *debt service to asset* (DSA), dan *level of capital outlay ratio* (LCO). Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *level of capital outlay ratio* (LCO) memiliki nilai minimum sebesar 0.076 dan nilai maksimum 0.411 dengan nilai rata-rata 0.190911 dan standar deviasi sebesar 0.087145861. Dilihat dari nilai rata-rata LCO dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki jumlah pengeluaran modal yang tidak terlalu tinggi atas jumlah pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh.

Untuk variabel *total expenditure to revenue ratio* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0.916 dan nilai maksimum 1.114 dengan nilai rata-rata 0.996422 dan standar deviasi sebesar 0.039011938. Dilihat dari nilai rata-rata ETR dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki jumlah pengeluaran yang tidak terlalu tinggi atas jumlah pendapatan pemerintah daerah yang tinggi atau pemerintah daerah disimpulkan dalam keadaan yang efisien.

Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *fixed cost to operating revenue* (FETOR) memiliki nilai minimum sebesar 0.975 dan nilai maksimum 27.396 dengan nilai rata-rata 9.808 dan standar deviasi sebesar 4.472890783. Dilihat dari nilai rata-rata FETOR dan standar deviasinya terlihat bahwa beberapa pemerintah daerah tingkat II

pada tahun 2009 memiliki jumlah pengeluaran tetap (rutin) yang rendah atas jumlah pendapatan asli pemerintah daerah yang tinggi.

Untuk variabel *debt service to asset* (DSA) memiliki nilai minimum sebesar 0.005 dan nilai maksimum 0.04 dengan nilai rata-rata 0.0168 dan standar deviasi sebesar 0.011142874 . Dilihat dari nilai rata-rata DSA dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mengindikasikan bahwa jumlah *asset* yang digunakan pemerintah daerah yang dalam pembayaran pokok pinjaman dan bunga tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dinyatakan pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 dalam kondisi efisien.

Untuk rasio hutang diproksikan dengan *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}) , *liquidity* (LQ), *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) , *long term debt to total asset* (LTDA) ,dan *debt to revenue* (DTR). Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *current liability government wealth* (CL_{GW}) memiliki nilai minimum sebesar 0.005 dan nilai maksimum 0.047 dengan nilai rata-rata 0.017356 dan standar deviasi sebesar 0.011828616 . Dilihat dari nilai rata-rata CL_{GW} dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat dengan hutang jangka pendek untuk memperoleh pendapatan dan jumlah hutang jangka pendek kepada pemerintah pusat relatif sama.

Untuk variabel *current liability fund* (CL_{FUND}) memiliki nilai minimum sebesar 0.002 dan nilai maksimum 106.593 dengan nilai rata-rata 3.239556 dan standar deviasi sebesar 15.86884533. Dilihat dari nilai rata-rata CL_{FUND} dan standar deviasinya yang cukup tinggi terlihat bahwa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki hutang jangka panjang yang beraneka ragam.

Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *liquidity* (LQ) memiliki nilai minimum sebesar 1.098 dan nilai maksimum 628.76 dengan nilai rata-rata 123.6158 dan standar deviasi sebesar 166.1837284. Dilihat dari nilai rata-rata LQ dan standar deviasinya terlihat bahwa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 memiliki tingkat likuiditas yang variatif dalam melunasi hutang lancar.

Untuk variabel *debt to revenue* (DTR) memiliki nilai minimum sebesar 0.001 dan nilai maksimum 0.116 dengan nilai rata-rata 0.015178 dan standar deviasi sebesar 0.023584749. Dilihat dari nilai rata-rata DTR dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mengindikasikan bahwa jumlah hutang pemerintah daerah relatif sama dan tidak begitu besar untuk memperoleh pendapatan.

Dalam tabel 4.1 dapat diketahui *long term debt to total asset* (LTDA) memiliki nilai minimum sebesar 0.002 dan nilai maksimum 5 dengan nilai rata-rata 0.176267 dan standar deviasi sebesar 0.792650571. Dilihat dari nilai rata-rata LTDA dan standar deviasinya terlihat bahwa pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009

memiliki hutang jangka panjang yang digunakan untuk pembelian asset pemerintah daerah relatif kecil karena yang mendekati nilai minimum hanya beberapa pemerintah daerah saja dan LTDA ada pada level rata-rata.

Untuk variabel *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) memiliki nilai minimum sebesar 0.006 dan nilai maksimum 0.51 dengan nilai rata-rata 0.096511 dan standar deviasi sebesar 0.124713421 . Dilihat dari nilai rata-rata CL_{NOR} dan standar deviasinya terlihat bahwa sebagian besar pemerintah daerah tingkat II pada tahun 2009 mengindikasikan bahwa jumlah hutang lancar pemerintah daerah relatif sama dan tidak begitu besar untuk memperoleh pendapatan asli daerah.

4.2 Analisis Data

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara variabel independen yang satu dengan yang lainnya. Sebuah persamaan regresi dikatakan baik bila persamaan tersebut memiliki variabel independen yang saling tidak berkorelasi (Syamsul Hadi,2009). Semakin rendah korelasi antar variabel independen maka persamaan tersebut semakin baik. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat besarnya nilai signifikan yang terjadi antar variabel bebas. Dapat dilihat dalam lampiran 3, dari 17 variabel terdapat 4 variabel yang mengalami multikol dengan tingkat korelasi mendekati dan di atas 0,8. (Gujarati, 1995 dalam

Syamsul Hadi, 2009) menyebutkan bahwa dua variabel yang memiliki tingkat korelasi 0,8 sudah terlalu tinggi, maka harus dihapus karena adanya korelasi diantara variabel independen.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui bahwa variabel PER_{FUND} dihapus karena mengalami multikol dengan variabel PER_{GW} dengan tingkat korelasi 0.782761 dan dengan variabel ETR dengan tingkat korelasi -0.78276. Variabel PM tidak digunakan dalam penelitian ini karena mengalami multikol dengan variabel PER_{GW} dengan tingkat korelasi 0.83087 dan ETR dengan tingkat korelasi -0.83087. Variabel ETR dihapus juga karena mengalami multikol dengan variabel PER_{FUND} dan PM seperti yang telah dijelaskan di atas. Variabel DTR dihapus karena mengalami multikol dengan variabel CL_{NOR} dengan tingkat korelasi 0.81747. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan oleh peneliti maka terdapat 13 variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *performance government wealth* (PER_{GW}), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), *position government wealth ratio* (POS_{GW}), *position fund ratio* (POS_{FUND}), *level of capital outlay* (LCO), *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR), *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}), *liquidity* (LQ), *long term debt to total asset* (LTDA), *debt service to asset* (DSA) serta *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}).

4.3 Hasil Perhitungan Regresi Binary Logistic

Tahap akhir dari dalam penelitian ini adalah melakukan analisis regresi dengan menggunakan software *Excel 2010*. Analisis regresi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel independen yang terdiri dari *Performance government wealth* (PER_{GW}), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), *position government wealth ratio* (POS_{GW}), *position fund ratio* (POS_{FUND}), *level of capital outlay* (LCO), *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR), *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}), *liquidity* (LQ), *long term debt to total asset* (LTDA), *debt service to asset* (DSA) serta *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) terhadap variabel dependen yaitu probabilitas pemerintah daerah untuk *financial distress* dan *non distress* yang dilihat dari nilai *debt service coverage ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah). Model regresi *binary logistic* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$\ln \frac{F}{F-1} = \beta_0 + \beta_1 \text{PERGW} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{ROA} + \beta_4 \text{POSGW} + \beta_5 \text{POSFUND} \\ + \beta_6 \text{LCO} + \beta_7 \text{FETOR} + \beta_8 \text{CLGW} + \beta_9 \text{CLFUND} + \beta_{10} \text{LQ} + \\ \beta_{11} \text{LDTA} + \beta_{12} \text{DSA} + \beta_{13} \text{CLNOR}$$

Dengan menggunakan bantuan *Excel 2010*, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Regresi Binary Logistik

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.802687
R Square	0.644306
Adjusted R Square	0.495144
Standard Error	0.298734
Observations	45

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	13	5.011269	0.385482	4.319505	0.000406946
Residual	31	2.766509	0.089242		
Total	44	7.777778			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Intercept	0.584136	0.293992	1.98691	0.055831
PER _{gw}	0.033278	1.646612	1.84213	0.07504
ROE	-0.76904	0.647206	-1.18825	0.243759
ROA	0.100615	0.195571	0.514467	0.610574
POS _{gw}	0.723745	1.188171	0.609125	0.54688
POS _{fund}	-0.00254	0.008185	-0.31054	0.758227
LCO	-2.25833	0.704215	-3.20687	0.003109
FETOR	-0.02198	0.011871	-1.85175	0.073607
CL _{gw}	8.689787	5.200534	1.670941	0.1048
CLF	0.001375	0.003162	0.434709	0.666785
LQ	-0.01424	0.000346	-1.12138	0.000267
LTDA	-0.12256	0.06158	-1.99019	0.055452
DSA	-5.74665	4.743839	-1.21139	0.234899
CLNOR	0.234117	0.652657	0.358714	0.72224

Hasil regresi pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa bentuk hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen dapat digambarkan dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln \frac{F}{F-1} = & 0.584136 + 0.033278_{\text{PER}_{\text{gw}}} - 0.76904_{\text{ROE}} + 0.100615_{\text{ROA}} + 0.723745_{\text{POS}_{\text{gw}}} - \\ & 0.00254_{\text{POS}_{\text{fund}}} - 2.25833_{\text{LCO}} - 0.02198_{\text{FETOR}} + 8.689787_{\text{CL}_{\text{gw}}} + 0.001375_{\text{CLF}} - 0.01424_{\text{LQ}} - \\ & 0.12256_{\text{LTDA}} - 5.74665_{\text{DSA}} + 0.234117_{\text{CLNOR}} \end{aligned}$$

4.3.1 Analisis Model

Untuk menguji model yang telah dibangun digunakan dua parameter uji yaitu adjusted R square, signifikan F dan signifikan konstanta α . Dari tabel 4.3 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi variabel independen yang terdiri dari *performance government wealth* (PER_{GW}), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), *position government wealth ratio* (POS_{GW}), *position fund ratio* (POS_{FUND}), *level of capital outlay* (LCO), *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR), *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}), *liquidity* (LQ), *long term debt to total asset* (LTDA), *debt service to asset* (DSA) serta *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}) sebesar 0.495144 atau 49,5%. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.495144, maka dapat diartikan bahwa 49,5% dari model dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari $PER_{GW}(X_1)$, $ROE(X_2)$, $ROA(X_3)$, $POS_{GW}(X_4)$, $POS_{FUND}(X_5)$, $LCO(X_6)$, $FETOR(X_7)$, $CL_{GW}(X_8)$, $CL_{FUND}(X_9)$, $LQ(X_{10})$, $LTDA(X_{11})$, $DSA(X_{12})$, $CLNOR(X_{13})$ sedangkan 50,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Sehingga kemampuan menjelaskan per variabel rata-rata adalah dengan ini kita dapat mengatakan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini adalah sudah cukup bagus karena dapat memberikan penjelasan rata-rata 3,8% untuk setiap variabel.

Dari tabel 4.3, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 4.319505 dan memiliki nilai *Significance F* sebesar 0.000406946. Nilai signifikansi ini menunjukkan tingkat kesalahan yang akan ditanggung bila menolak H_0 . Kecilnya nilai signifikansi F menunjukkan model yang diajukan baik karena nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun adalah tepat dan memiliki kemungkinan kesalahan yang sangat kecil. Kesimpulan dari indikator ini adalah bahwa model yang dibuat dalam penelitian ini dapat digunakan untuk analisa.

Kemudian dalam tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai t untuk intercept sebesar 0.584136 dengan nilai signifikansi (P value) atas intercept sebesar 0.056 yang lebih besar dari α 5%, maka dapat disimpulkan bahwa konstanta tidak signifikan. Agar sebuah model masuk dalam kategori baik, maka nilai signifikansi atas konstanta harus tidak signifikan (Syamsul Hadi,2009). Dikarenakan nilai intercept tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa intercept tidak mempengaruhi variabel dependen, sehingga tidak ada variabel lain di dalam model penelitian yang berpengaruh terhadap model.

4.3.2 Pengujian Hipotesis

4.3.2.1 Rasio Kinerja Keuangan

Dalam rasio kinerja keuangan ini, rasio kinerja keuangan yang dipakai adalah *performance government wealth* (PERGW), *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA). *Performance fund* (PERFUND) dan *profit margin* (PM) tidak dilakukan pengujian secara mendalam karena terjadinya multikol antar variabel dengan tingkat korelasi mendekati dan di atas 0,8. Berikut ini hasil pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap rasio kinerja keuangan.

Ho₁: Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance government wealth* (PER_{GW}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari tiga variabel dalam rasio kinerja keuangan terdapat satu variabel yang memiliki hasil yang signifikan terhadap *financial distress* yaitu *performance government wealth* (PER_{GW}) dengan tingkat signifikansi 0,07504, hasil ini menunjukkan bahwa PER_{GW} untuk pengujian prediksi satu tahun tidak berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Namun, untuk pengujian data satu tahun variabel PER_{GW} berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%.

Bila melihat hasil koefisien regresi yang dimiliki *performance government wealth* (PER_{GW}) sebesar 0.033278, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PER_{GW} dengan *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 sebagian besar pemerintah daerah kabupaten tingkat II pada pulau Jawa dan Bali mengalami surplus yang tinggi sehingga PER_{GW} memiliki nilai yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata pendapatan pemerintah daerah kabupaten tingkat II pada pulau Jawa dan Bali yaitu sebesar Rp 873.420.942.341,61.

Surplus yang tinggi belum tentu mengindikasikan pemerintah daerah tersebut memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode selanjutnya. Surplus yang diperoleh pemerintah daerah tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan pemerintah yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki surplus yang tinggi memiliki probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress*. Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis.

Dalam penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bambang Sutopo, Doddy Setiawan dan Sutaryo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa untuk pengujian prediksi satu tahun PER_{GW} mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi penelitian 5% dan 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa

variabel PER_{GW} tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H_{02} : Rasio kinerja keuangan yang berupa *performance fund* (PER_{FUND}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui bahwa variabel *performance fund* (PER_{FUND}) dihapus karena mengalami multikol dengan variabel *performance government wealth* (PER_{GW}) dengan tingkat korelasi 0.782761 dan dengan variabel *total expenditure to revenue ratio* (ETR) dengan tingkat korelasi -0.78276. Hasil ini menunjukkan hipotesa null nya gagal diuji.

H_{03} : Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on equity* (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui variabel ROE memiliki nilai koefisien sebesar -0.76904. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara variabel ROE dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Jika melihat nilai signifikansi yang dimiliki ROE sebesar 0.243759, dapat disimpulkan ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Temuan dalam penelitian ini sesuai

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bambang Sutopo, Doddy Setiawan dan Sutaryo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa untuk pengujian prediksi satu tahun ROE mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi penelitian 5% dan 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel ROE tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H₀₄: Rasio kinerja keuangan yang berupa *return on asset* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa variabel ROA memiliki nilai koefisien sebesar 0.100615. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel ROA dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi yang dimiliki ROA sebesar 0.610574, maka dapat disimpulkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bambang Sutopo, Doddy Setiawan dan Sutaryo pada tahun 2010 menunjukkan bahwa untuk pengujian prediksi satu tahun ROA berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%.

H₀₅: Rasio kinerja keuangan yang berupa *profit margin* (PM) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui variabel *profit margin* (PM) tidak digunakan dalam penelitian ini karena mengalami multikol dengan variabel *performance government wealth* (PER_{GW}) dengan tingkat korelasi 0.83087 dan dengan variabel *total expenditure to revenue ratio* (ETR) dengan tingkat korelasi -0.83087. Hasil ini menunjukkan hipotesa null nya gagal diuji.

4.3.2.2 Rasio Posisi Keuangan

Dalam Penelitian ini, rasio posisi keuangan yang digunakan adalah *position fund ratio* (POS_{FUND}) dan *position government wealth ratio* (POS_{GW}).

H₀₆: Rasio posisi keuangan yang berupa *position fund ratio* (POS_{FUND}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa *position fund ratio* (POS_{FUND}) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.00254. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara variabel POS_{FUND} dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Hasil tersebut konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis, tetapi dengan nilai signifikansi yang dimiliki POS_{FUND} sebesar 0.758227 menunjukkan bahwa POS_{FUND} tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data satu tahun yang diperoleh hasil POS_{FUND} mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari signifikansi penelitian 5% dan 10%, yang dapat disimpulkan bahwa POS_{FUND} tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H₀₇: Rasio posisi keuangan yang berupa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa *position government wealth ratio* (POS_{GW}) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.723745. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara variabel POS_{GW} dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi yang dimiliki POS_{GW} sebesar 0.54688, maka dapat disimpulkan bahwa POS_{GW} tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima.

Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bambang Sutopo, Doddy Setiawan dan Sutaryo pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa POS_{GW} memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* pada signifikansi 10%. Dalam penelitian tersebut POS_{GW} memiliki tanda koefisien yang negatif sesuai dengan tanda koefisien yang diharapkan dalam penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan rasio POS_{GW} yang tinggi mempunyai kemungkinan untuk mengalami financial distress yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah daerah mempunyai rasio POS_{GW} yang rendah. Rasio POS_{GW} yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah yang mempunyai rasio POS_{GW} yang tinggi mempunyai pendapatan yang tinggi, sehingga selain mampu membiayai kegiatan operasi juga mampu melakukan pendanaan *asset* daerah dalam aktiva tetap tanpa mengalami kesulitan keuangan.

4.3.2.3 Rasio Efisiensi

Dalam rasio efisiensi ini, rasio yang digunakan adalah *fixed cost to operating revenue* (FETOR), *debt service to asset* (DSA), serta *level of capital outlay ratio* (LCO). *Maintenance effort* (ME) tidak digunakan dalam penelitian ini karena pemerintah daerah tidak setiap tahun menunjukkan biaya perbaikan dan pemeliharaan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio efisiensi yang berupa *total expenditure to revenue ratio* (ETR) tidak dilakukan pengujian secara

mendalam karena terjadinya multikol antar variabel dengan tingkat korelasi mendekati dan di atas 0,8.

H₀₈: Rasio efisiensi yang berupa *total expenditure to revenue ratio* (ETR) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui bahwa Variabel ETR dihapus karena mengalami multikol dengan variabel *performance fund* (PERFUND) dengan tingkat korelasi -0.78276 dan variabel *profit margin* (PM) dengan tingkat korelasi -0.83087. Hasil ini menunjukkan hipotesa null nya gagal diuji.

H₀₉: Rasio efisiensi yang berupa *fixed expenditures to operating revenues* (FETOR) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 terdapat variabel FETOR yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.02198. Dari hasil koefisien regresi tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara variabel FETOR dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Variabel FETOR memiliki nilai signifikansi sebesar 0.073607 yang menunjukkan bahwa variabel FETOR tidak berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah dalam mengalami *financial distress* pada signifikansi 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Namun, untuk pengujian data satu tahun variabel FETOR berpengaruh

terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%.

FETOR merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran tetap dengan jumlah pendapatan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2009 menanggung pengeluaran tetap yang rendah dengan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi atau pemerintah daerah dalam kondisi yang efisien. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa rata-rata pendapatan asli daerah pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 102.168.450.867,47.

Pendapatan asli daerah yang cukup tinggi menyebabkan surplus yang tinggi bagi pemerintah daerah. Surplus yang tinggi belum tentu mengindikasikan pemerintah daerah tersebut memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode selanjutnya. Surplus yang diperoleh pemerintah daerah tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan pemerintah yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki surplus yang tinggi memiliki probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan (2010) dalam pengujian data satu tahun (2005) yang menunjukkan bahwa variabel FETOR memiliki nilai signifikansi lebih besar dari

5% dan 10%. Artinya, variabel FETOR tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H₀₁₀: Rasio efisiensi yang berupa *debt service to asset* (DSA) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 juga terdapat variabel DSA yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar -5.74665. Bila melihat nilai signifikansi yang dimiliki DSA sebesar 0.234899, maka dapat disimpulkan DSA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan (2010) dalam pengujian data satu tahun (2005) yang menunjukkan bahwa variabel DSA memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 5% dan 10%. Artinya, variabel DSA tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada satu tahun setelah penerbitan laporan keuangan, baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H₀₁₁: Rasio efisiensi yang berupa *level of capital outlay* (LCO) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dari tabel 4.3, dapat diketahui bahwa LCO mempunyai koefisien regresi sebesar -2.25833, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara variabel LCO dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. LCO memiliki nilai signifikansi sebesar 0.003109 hal ini menunjukkan bahwa LCO memiliki pengaruh signifikan yang kuat atau LCO untuk pengujian prediksi satu tahun berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 5%. Tanda koefisien LCO yang negatif mengindikasikan bahwa pemerintah daerah pada tahun 2009 melakukan jumlah pengeluaran modal yang rendah untuk menghasilkan jumlah pendapatan pemerintah daerah yang tinggi.

Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata jumlah pengeluaran modal pemerintah daerah kabupaten tingkat II pada pulau Jawa dan Bali pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp 134.756.983.533,76. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi menyebabkan surplus yang tinggi bagi pemerintah daerah. Surplus yang tinggi belum tentu mengindikasikan pemerintah daerah tersebut memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan pada periode selanjutnya. Surplus yang diperoleh pemerintah daerah tersebut harus dikembalikan ke kas negara dan pemerintah yang bersangkutan hanya diperbolehkan mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat sebesar realisasi tahun sebelumnya. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah yang memiliki surplus yang tinggi memiliki probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress*. Hal ini menunjukkan

bahwa hipotesa null tidak diterima. Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan pengujian prediksi satu tahun (2005) yang dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan, variabel LCO mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi penelitian 5% dan 10%. Sehingga dalam pengujian satu tahun variabel LCO dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

4.3.2.4 Rasio Hutang

Dalam rasio hutang ini, rasio yang digunakan adalah *current liquidity government wealth* (CL_{GW}), *current liquidity fund* (CL_{FUND}), *liquidity* (LQ), *long term debt to total asset* (LTDA) serta *current liabilities to net operating revenue* (CL_{NOR}). *Debt to revenue* (DTR) tidak dilakukan perhitungan secara mendalam karena terjadinya multikol antar variabel dengan tingkat korelasi di atas 0,8.

H_{012} : Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability government wealth* (CL_{GW}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa CL_{GW} memiliki hasil koefisien regresi sebesar 8.689787, hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif antara variabel CL_{GW} dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi sebesar 0.1048, maka dapat disimpulkan variabel CL_{GW} tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah

mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data satu tahun (2005) yang mengindikasikan bahwa variabel CL_{GW} berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%.

H_{013} : Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liability fund* (CL_{FUND}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 juga dapat diketahui bahwa variabel CL_{FUND} memiliki hasil koefisien regresi sebesar 0.001375, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara variabel CL_{FUND} dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi sebesar 0.666785, maka dapat disimpulkan CL_{FUND} tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data satu tahun (2005) yang mengindikasikan bahwa variabel CL_{FUND} mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari signifikansi penelitian 5% dan 10% yang dapat disimpulkan CL_{FUND}

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%.

H₀₁₄: Rasio hutang pemerintah yang berupa *liquidity* (LQ) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Variabel *liquidity* (LQ) dalam tabel 4.3 memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.01424 yang menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara variabel *liquidity* (LQ) dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi yang dimiliki LQ sebesar 0.000267 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan atau LQ berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah dalam mengalami *financial distress* pada signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa null tidak diterima.

Temuan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data setahun (2005) yang mengindikasikan bahwa variabel LQ mempunyai tanda negatif dan konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis. Tanda koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka rasio LQ semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil revidu atas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan hutang lancar pemerintah daerah sebagian besar dilakukan pada pemerintah pusat sehingga bunga dan pembayaran pokok hutang tersebut menjadi

lebih fleksibel. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan tingginya angka rasio LQ berarti pemerintah daerah memiliki dana yang cukup untuk melunasi hutang lancar tersebut dengan menggunakan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan dana yang cukup untuk melunasi hutang lancar tersebut, maka probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* semakin kecil.

H₀₁₅: Rasio hutang pemerintah yang berupa *current liabilities to net operating* (CL_{NOR}) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui bahwa CL_{NOR} memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.234117, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara variabel CL_{NOR} dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Bila melihat nilai signifikansi sebesar 0.72224, maka dapat disimpulkan variabel CL_{NOR} tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* baik pada signifikansi 5% maupun 10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data satu tahun (2005) yang mengindikasikan bahwa variabel CL_{NOR} memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* pada signifikansi 10%.

H₀₁₆: Rasio hutang pemerintah yang berupa *long term debt to total asset* (LTDA) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam tabel 4.3 dapat diketahui nilai signifikansi yang dimiliki LTDA sebesar 0.055452 dapat disimpulkan bahwa LTDA tidak berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah dalam mengalami *financial distress* pada signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa null diterima. Namun, untuk pengujian data satu tahun LTDA berpengaruh terhadap probabilitas *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia pada signifikansi 10%. Bila melihat nilai koefisien regresi yang dimiliki variabel LTDA sebesar -0.12256 menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara variabel LTDA dengan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010 dalam pengujian data setahun (2005) yang mengindikasikan bahwa variabel LTDA mempunyai tanda negatif dan konsisten dengan logika teori dalam pengembangan hipotesis. Tanda koefisien regresi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi angka rasio LTDA semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan bahwa hutang pemerintah daerah yang dilakukan pada pihak ketiga (perbankan dan kreditur lain) dalam jumlah yang relatif kecil. Hutang pemerintah daerah sebagian besar dilakukan kepada pemerintah pusat.

Oleh karena itu, bunga dan pembayaran pokok hutang tersebut menjadi lebih fleksibel. Adanya hal ini berimplikasi pada jumlah hutang pemerintah yang besar dalam rangka pendanaan pembangunan daerah. Hutang pada pemerintah pusat ini menjadi alternatif bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendanaan dalam pembangunan daerah guna dapat menghasilkan pelayanan yang baik bagi publik. Semakin tinggi jumlah hutang pemerintah, semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*, sehingga pemerintah daerah yang mengalami *financial distress* berkecenderungan untuk mempunyai jumlah hutang yang lebih kecil bila dibanding pemerintah daerah *non financial distress*.

H_{017} : Rasio hutang pemerintah yang berupa *debt to revenue* (DTR) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*.

Dalam lampiran 3 dapat diketahui variabel *debt to revenue* (DTR) dihapus karena mengalami multikolinier dengan variabel *current liabilities to net operating* (CL_{NOR}) dengan tingkat korelasi 0.81747. Hasil ini menunjukkan hipotesa null nya gagal diuji.

Tabel 4.4

Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Alternatif	$\alpha = 5\%$	$\alpha = 10\%$
Rasio kinerja keuangan : PER_{GW} berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Terbukti
Rasio kinerja keuangan : PER_{FUND} berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Gagal Diuji Karena Multikol	Gagal Diuji Karena Multikol
Rasio kinerja keuangan : ROE berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio kinerja keuangan : ROA berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak terbukti	Tidak Terbukti
Rasio kinerja keuangan : PM berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Gagal Diuji Karena Multikol	Gagal Diuji Karena multikol
Rasio posisi keuangan : POS_{FUND} berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio posisi keuangan : POS_{GW} berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio efisiensi : ETR berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Gagal Diuji Karena Multikol	Gagal Diuji Karena Multikol

Rasio efisiensi : FETOR berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio efisiensi : DSA berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio efisiensi : LCO berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio hutang : LQ berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Terbukti	Terbukti
Rasio hutang : LTDA berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Terbukti
Rasio hutang : CL _{GW} berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio hutang : CL _{FUND} berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio hutang : CL _{NOR} berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Tidak Terbukti	Tidak Terbukti
Rasio hutang : DTR berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami <i>financial distress</i> .	Gagal Diuji Karena Multikol	Gagal Diuji Karena Multikol

BAB V

PENUTUP

Dalam bab v ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian ini dan keterbatasan yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung serta saran yang diberikan oleh peniliti untuk penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai yang relevan terkait dengan kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model penelitian dengan *binary logistic regression* yang menunjukkan bahwa variabel *performance government wealth* (PERgw), *level of capital outlay* (LCO), *fixed expenditure to operating revenues* (FETOR), *liquidity* (LQ) serta *long term debt to total asset* (LTDA) berpengaruh secara signifikan dengan tingkat yang berbeda terhadap *financial distress* pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) pada pulau Jawa dan Bali di Indonesia pada tahun (2009) setelah satu tahun penerbitan laporan keuangan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengujian data satu tahun variabel *level of capital outlay* (LCO) dan *liquidity* (LQ) mempunyai nilai probabilitas yang lebih kecil dari signifikansi 5%, sehingga memiliki pengaruh yang kuat terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial*

distress. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui bahwa variabel *performance government wealth* (PER_{gw}), *fixed expenditure to operating revenues* (FETOR), *long term debt to total asset* (LTDA) mempunyai nilai probabilitas yang lebih kecil dari signifikansi 10%, sehingga *performance government wealth* (PER_{gw}), *fixed expenditure to operating revenues* (FETOR), *long term debt to total asset* (LTDA) berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* pada signifikansi 10%. Variabel-variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini seperti *return on equity* (ROE), *return on asset* (ROA), *position government* (POS_{GW}), *position fund* (POS_{FUND}), *debt service to assets* (DSA), *current liability government wealth* (CL_{GW}), *current liability fund* (CL_{FUND}), serta *current liabilities to net operating revenues* (CL_{NOR}) tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten dan Kota) pada pulau Jawa dan Bali di Indonesia pada periode satu tahun (2009) setelah satu tahun penerbitan laporan keuangan baik dalam signifikansi 5% maupun 10%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode satu tahun setelah pelaporan, dan hanya menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah pada tingkat II (Kabupaten dan Kota) pada pulau Jawa dan Bali di Indonesia sebagai sampel dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 17 rasio keuangan dari 18 rasio keuangan yang terdapat di dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan pada tahun 2010, dengan tidak memasukkan rasio *maintenance effort* sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini, karena dalam rasio tersebut menggunakan pembilang *repair and maintenance expenditures*, yang belum tentu di masukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun.
3. Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa *fixed cost* yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai belanja operasi karena dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, akun belanja pemerintah daerah hanya digolongkan dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

5.3 Saran

Dari keterbatasan-keterbatasan di atas, penelitian selanjutnya disarankan:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan tidak hanya dalam periode satu atau dua tahun saja tetapi dapat lebih dari itu dan cakupan daerah yang diteliti lebih luas dengan memperhatikan ukuran daerah dan status daerah sehingga sampel yang digunakan lebih banyak dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan 18 rasio keuangan seperti yang terdapat di dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada tahun 2010 oleh Sutaryo, Bambang Sutopo dan Doddy Setiawan.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menggunakan belanja operasi bukan *fixed cost* yang dipergunakan dalam perhitungan rasio keuangan, karena dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, akun belanja pemerintah daerah hanya digolongkan dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Daftar Pustaka

- Altman, Edward I, 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and The Prediction of Corporate Bankruptcy. *Journal of Finance*, 23(4): 137-152.
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal. *Annual Conference*. 5th. HFAA. Thessaonica.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gordon, G dan Jordan, C. 1988. Predicting Financial Distress of Texas Savings and Loans. *Southwest Journal of Business and Economics*. 5: 21-64.
- Hadi, Syamsul. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan. . Edisi 1. Yogyakarta: Badan Penerbit EKONISIA.
- Halim, Abdul dan Damayanti. 2008. *Manajemen Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai*. BPF. Yogyakarta.
- Hofer, C.W. 1980. "Turnaround Strategies". *Journal of Business Strategy* 1:19-31
- Ingram, R. W., K. K. Raman dan E. R., Wilson. 1987. Governmental Capital Market Research in Accounting: A Review. *Research in Governmental and Non Profit Accounting*. 3: 98-97.
- Jones, Stewart dan R., G., Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. 43(3): 396-418.
- Platt, H., dan M. B. Platt. 2002. Predicting *Financial distress*. *Journal of Financial Service Professionals*. 56: 12-15.
- Purwanti, Yulia. 2005. "Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta" Skripsi, FE UII Yogyakarta.
- Reck, J. L., E., R, Wilson, D. Gotlob, dan M. Lawrence. 2004. Government Capital Markets Research in Accounting: A Review. Extension and Directions Future. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting*. 11: 1-33.

- Ryan, Christine, Dunstan, Keitha dan Brown, Jenet. 2002. The Value of Public Sector Annual Reports and Annual Reporting Awards in Organisational Legitimacy” *Accounting, Accountability and Performance*. 8(1): 61-76.
- Steven, J., dan McGowen, R. 1983. Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective. *Policy Study Rivew*. 2(3): 33-51.
- Sugiyono. 2007. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung: Alfabeta
- Sutaryo, Bambang, S., dan Doddy, S.2010. *Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Terkait Financial Distress Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII.Purwokerto.
- Whitaker, R. B. 1999. "The Early Stages of Financial Distress". *Journal of Economics and Finance*, 23: 123-133.
- Widarjo,Wahyu dan Doddy ,S. 2009. *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Otomotif*. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol.11, Hal.107-119.
- Zu’amroh, Surroh. 2005. *Perbandingan Ketepatan Klasifikasi Prediksi Kepailitan Berbasis Akrual dan Berbasis Aliran Kas*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VIII. Solo. 15-16 September

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota) yang menjadi sampel penelitian ini.

1	Sumedang	24	Kabupaten Madiun
2	Kota Cirebon	25	Kabupaten Malang
3	Batang	26	Mojokerto
4	Boyolali	27	Ngawi
5	Brebes	28	Pamekasan
6	Cilacap	29	Ponorogo
7	Grobogan	30	Situbondo
8	Karanganyar	31	Tuban
9	Kendal	32	Tulungagung
10	Kudus	33	Kota Malang
11	Kabupaten Magelang	34	Lebak
12	Pekalongan	35	Tabanan
13	Pemalang	36	Kabupaten Semarang
14	Purbalingga	37	Sukoharjo
15	Purworejo	38	Kota Semarang
16	Bantul	39	Kota Yogyakarta
17	Gunung Kidul	40	Lumajang
18	Kulon Progo	41	Cirebon
19	Bojonegoro	42	Blora

20	Bondowoso	43	Rembang
21	Jember	44	Surakarta
22	Kediri	45	Sleman
23	Lamongan		

Lampiran 2 : Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kota) yang mengalami financial distress.

1	Sumedang	19	Bojonegoro
2	Kota Cirebon	20	Bondowoso
3	Batang	21	Jember
4	Boyolali	22	Kediri
5	Brebes	23	Lamongan
6	Cilacap	24	Kabupaten Madiun
7	Grobogan	25	Kabupaten Malang
8	Karanganyar	26	Mojokerto
9	Kendal	27	Ngawi
10	Kudus	28	Pamekasan
11	Kabupaten Magelang	29	Ponorogo
12	Pekalongan	30	Situbondo
13	Pemalang	31	Tuban
14	Purbalingga	32	Tulungagung
15	Purworejo	33	Kota Malang
16	Bantul	34	Lebak

17	Gunung Kidul	35	Tabanan
18	Kulon Progo		

Lampiran 3 : Uji Multikolinearitas

KODE	PER _g w	PER _f und	ROE	ROA	PM	POS _g w	POS _f und	LCO	ETR	FETOR	CL _g w	CLF	LQ	DTR	LDTA	DSA	CLNOR
KODE	1																
PER _g w	-0.15	1															
PER _f und	-0.13	0.782761	1														
ROE	-0.26	0.551358	0.419289	1													
ROA	-0.09	0.203227	0.157087	0.086146	1												
PM	-0.14	0.833087	0.606586	0.707401	0.232194	1											
POS _g w	0.066	-0.01071	-0.05316	-0.0416	0.101504	-0.01246	1										
POS _f und	0.03	-0.03532	-0.05305	0.023823	-0.06012	0.081444	0.36638	1									
LCO	-0.43	-0.10192	-0.08657	0.131221	0.3748	0.008395	0.199588	0.255171	1								
ETR	0.152	-1	-0.78276	-0.55136	-0.20323	0.010713	0.03532	0.101918	0.03532	1							
FETOR	-0.27	-0.10796	-0.13194	-0.18671	-0.09528	-0.25977	-0.37679	-0.21808	-0.04342	0.107962	1						
CL _g w	0.148	-0.02178	-0.01923	0.105956	0.294915	0.137589	0.060397	0.424545	0.183866	0.021781	-0.23909	1					
CLF	-0.09	-0.07194	-0.18375	0.017534	-0.02898	-0.04406	-0.02285	0.092923	0.206229	0.071935	0.011342	0.106847	1				
LQ	0.479	0.264933	0.393519	0.059551	-0.07112	0.089076	-0.03789	-0.08875	-0.26617	-0.26493	-0.0936	-0.22923	-0.14012	1			
DTR	-0.1	-0.05824	-0.13135	0.084851	-0.05686	0.100615	-0.0836	0.421724	0.301278	0.058236	-0.13625	0.457369	0.713549	-0.30528	1		
LDTA	0.031	-0.07499	-0.03322	0.014529	-0.02985	-0.05074	0.089993	0.043212	-0.10127	0.074993	-0.10509	-0.01317	-0.03859	0.266644	-0.0866	1	
DSA	-0.09	0.11639	0.065236	-0.1416	-0.12479	0.116201	-0.11939	-0.17239	-0.22716	-0.11639	-0.02778	0.190587	-0.06962	0.084284	0.19336	1	
CLNOR	-0.18	-0.06953	-0.14077	0.095567	-0.05884	0.118639	-0.04531	0.613161	0.37633	0.069529	-0.07189	0.506112	0.311023	-0.3953	0.81747	0.08875	0.08917